

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN SIMPANAN
BERJANGKA DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO
GRESIK**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan jenjang Strata-1 (S1)

Oleh:

Eggy Setia Pradana Putra

NIM: C02215017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eggy Setia Pradana Putra
NIM : C02215017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan
Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang
Campurejo Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Eggy Setia Pradana Putra
NIM. C02215017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eggy Setia Pradana Putra NIM. C02215017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2019
Pembimbing,



M. Romdlon, S11., M.Hum
NIP. 196212291991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eggy Setia Pradana Putra NIM. C02215017 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

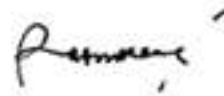
Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



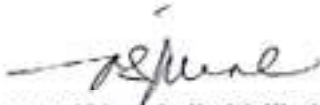
M. Romdlon, S.H., M.Hum.
NIP: 196212291991031003

Penguji II



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP: 195609231986031002

Penguji III



H. Arif Jamaludin Malik, M.Ag.
NIP: 197211061996031001

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si.
NIP: 198411212018011002

Surabaya, 26 Juli 2019

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eggy Setia Pradana Putra
NIM : C02215017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : Eggyadanaputa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN SIMPANAN BERJANGKA
DI BMT SURYA RAHARJA CABANG CAMPUREJO GRESIK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2019
Penulis

Eggy Setia Pradana Putra

D. Kajian Pustaka

Dalam memudahkan penulis untuk mendapatkan gambaran umum terkait pembiayaan Simpanan Berjangka yang menggunakan akad *muḍārabah* maka penulis perlu mencari kajian pustaka untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan yang memiliki topik yang sejenis, hampir mirip atau memiliki keterkaitan terhadap objek pembahasan agar tidak terjadi pengulangan, duplikasi atau plagiasi. Dalam menentukan kajian pustaka ini, penulis menemukan tiga penelitian yang memiliki topik pembahasan yang hampir sejenis. Yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Tsulutsul Uula Darobi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaan *Muḍārabah* di BMT Ummat Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembiayaan *Muḍārabah* yang mana di BMT Ummat terjadi masalah antara pihak nasabah dan pihak BMT yaitu krisis kepercayaan oleh pihak BMT terhadap nasabah tentang pendapatan keuntungannya dari bagi hasil usahanya, karena sebagian anggota tidak sanggup dalam memberikan laporan laba rugi yang secara transparan sehingga membuat pihak BMT menjadi penghambat perkembangan BMT. Dalam prinsip akad *muḍārabah* haruslah transparan dalam hasil setelah melakukan usaha harus di laporkan secara

pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun, jenis-jenis, manfaat dan resiko beserta berakhirnya akad *muḍārabah*.

Bab ketiga, merupakan pemaparan objek pembahasan yaitu gambaran tempat yang dijadikan objek penelitian. Meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi, produk-produk yang ada di BMT tersebut dan deskripsi mekanisme praktik pembiayaan simpana berjangka lalu mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan simpanan berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

Bab keempat, memuat tentang analisis penelitian. Yakni analisis tentang tinjauan hukum islam terhadap Prosedur dan Implementasi pembiayaan Simpanan Berjangka di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai saran yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.

- c. Pembagian hasil *muḍārabah* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembagian laba (*profit shariang*) atau pembagian pendapatan (*revenue shariang*). Pembagian laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *muḍārabah*. Sementara itu, pembagian pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *muḍārabah*.
- d. Bagi keabsahan *muḍārabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *ṣāhibul māl* dan *mudharib* sudah harus ditentukan sejak awal. *Syariah* tidak menentukan pembatasan mengenai berapa besarnya pembagian keuntungan di antara *ṣāhibul māl* dan *mudharib*. Pembagian tersebut diserahkan kepada kesepakatan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. mereka dapat menyepakati untuk berbagi keuntungan sama besar atau berbagi dengan porsi yang berbeda di antara keduanya.
- e. Namun harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan suatu jumlah yang tetap atau tidak boleh pula mereka menentukan pembagian dengan menentukan tingkat ketentuan tertentu terhadap modal. Misalnya apabila modal sebesar Rp 100.000,- maka mereka dilarang menentukan bahwa sebesar Rp 10.000,- dari keuntungan diberikan kepada *mudharib* atau bahwa 20% dari modal akan diberikan kepada *Sahibul mal*. Namun diprkenakan apabila mereka

menyepakati bahwa 40% dari keuntungan akan diterima *muḍārib* dan 60% kepada *ṣāhibul māl* atau sebaliknya.

- f. Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk keadaan yang berbeda. Misalnya, *ṣāhibul māl* dapat mengemukakan kepada *muḍārib*, “Apabila anda berdagang gandum, maka anda akan memperoleh 50% dari keuntungan dan apabila anda berdagang tepung maka anda akan memperoleh 30% dari keuntungan” begitu juga sebaliknya.
- g. Di samping memperoleh bagian dari keuntungan, *muḍārib* tidak dapat menuntut untuk memperoleh gaji tetapi atau sejumlah *fee* atau remunerasi sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *muḍārabah* tersebut. Semua Mazhab Fikih Islam telah bersepakat mengenai masalah ini. Namun Imam Ahmad telah membolehkan *muḍārib* untuk mengambil biaya harian hanya untuk makan dari rekening *muḍārabah*. Sementara itu, para ahli hukum dari Madzab Hanafi membatasi hak *muḍārib* yang demikian itu hanya apabila *muḍārib* sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kotanya. Namun demikian tidak dilarang apabila pemberian gaji kepada *muḍārib* tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
- h. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai

untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru sisanya, apabila ada, dibagikan kepada para pihak sesuai dengan perimbangan (rasio) yang sudah disetujui.

- i. Dalam hal *muḍārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapusbukukannya kerugian itu dan terhadap modal *ṣāhibul māl* telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan). Pengembalian keuntungan sebelum perjanjian *muḍārabah* berakhir akan dianggap sebagai uang muka (*advance*). Dalam hal perjanjian *muḍārabah* tidak menentukan jangka waktunya yaitu dalam hal *muḍārabah* berkelanjutan, maka diperkenankan untuk memperjanjikan penetapan suatu jangka waktu tertentu untuk melakukan pembagiaan keuntungan dengan memperlakukan setiap jangka waktu tersebut sebagai jangka waktu yang terpisah satu sama lain.
- j. Apabila terjadi kerugian, maka *ṣāhibul māl* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima imbalan apa pun untuk kerja dan usahanya. Dengan demikian, baik posisi *ṣāhibul māl* maupun *muḍārib* harus menghadapi resiko. Namun seperti dikemukakan di muka, yang menanggung resiko finansial hanyalah *ṣāhibul māl* sendiri, sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak menanggung resiko finansial tetapi resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama

Oleh karenanya, kegiatan usaha bank konvensional bukan termasuk *muḍārabah*, sebab bank telah meminjam keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Atau dalam usaha pemberian modal kepada nasabah, bank mensyaratkan keuntungan yang harus dijamin.

Ketimpangan akan terjadi jika salah satu pihak mengalami kerugian atau pihak yang mengelolah mendapatkan keuntungan berlipat, sedangkan bagian yang didapatkan oleh pihak yang memberi modal tidak bertambah.

Selain itu, membagi kerugian bersama berarti orang yang mengelolah (*muḍārib*) tidak dikenai kewajiban untuk mengembalikan modal awal jika terjadi keraguan yang disebabkan bukan karena kelalaiannya.

Maka mengingat risiko yang terdapat dalam praktik *muḍārabah*, bank syariah harus menjelaskan mekanisme *muḍārabah* yang diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito secara gamblang kepada nasabah yang ingin menabung atau mendepositokan uangnya. Hal ini dimaksud untuk memenuhi syarat akad *muḍārabah* yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

8. Berakhrianya Akad *Muḍārabah*

Menurut para ulama menyatakan bahwa akad *muḍārabah* dinyatakan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

diantaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan dari rentenir tersebut. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada para peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan interest return dengan jangka waktu sangat pendek. Sehingga praktek ini secara tidak langsung tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh Karena itu dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa mengcover kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu baitul maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai mustahik. Adapun sumber dana dari baitul maal tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Namun demikian institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk khilafah (kepemimpinan) pada umat tersebut pada

akhir-akhir abad 16 masehi. Sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing. Pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini (abad 20) dengan kontribusi baitul maal pada masa kekhilafahan Islam dahulu. Sehingga muncul konsep baitul maal wattamwil walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro, dikarenakan tidak ada lembaga Negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga keuangan atau paling tidak menjadi salah satu sektor keuangan Negara Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena multi agama yang ada di Indonesia menjadi kepentingan politik untuk itu.

Pada perkembangan BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi baitul maal itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu baitul tamwil atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif daripada mustahik ada juga instrument pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh Islam atau sering disebut dalam tulisan ini nantinya dengan prinsip *syariah*.

Alamatnya di Jln. Pasar Campurejo, Campurejo, Panceng, Gresik.
Letak kantor sangat strategis yaitu dekat pasar Campurejo Panceng

- a. SIMJAKA 3 bulan dengan nisbah 30% : 70%
- b. SIMJAKA 6 bulan dengan nisbah 40% : 60%
- c. SIMJAKA 12 bulan dengan nisbah 50% : 50%

ini yang membuat nasabah tertarik untuk membuka simpanan berjangka di BMT Surya Raharja karena dengan di iming-iming bagi hasil yang akan di dapatkan.

Terdapat 4 keunggulan dalam produk simpanan berjangka ini di BMT Surya Raharja yaitu:

- Simpanan berjangka dapat dijadikan angunan pembiayaan
- Simpanan berjangka tidak dibebeni biaya administrasi bulanan
- Bagi hasil dapat diambil per bulan
- Dikelola secara produktif dengan nisbah yang menguntungkan

Dari 4 keunggulan di atas bahwa bagi hasil bisa diambil per bulan dan apabila nasaba sudah di ambil sebelum jangka waktu tempo maka untuk jangka waktu sesungguhnya tidak dapat apa-apa. Pada praktiknya simpanan berjangka adalah untuk bagi hasil hanya bisa di ambil dalam jangka tempo yang telah di sepakati akan tetapi dalam hal ini bisa diambil per bulan.

Apabila setelah kontrak simpanan berjangka selesai maka modal awal akan otomatis masuk kerekenng tabungan nasabah sembari

Namun, di sini penulis akan menganalisis tentang praktik pembiayaan simpanan berjangka yang di tawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, di tekukan fakta-fakta yang secara langsung bagaimana prosedur dan implementasi simpanan berjangka yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. Berdasarkan temuan fakta yang ada di lapangan dapat dikumpulkan menjadi susunan data guna melengkapi penelitian penulis.

Pertama, prosedur awal proses pengajuan bahwa nasabah mengajukan pembiayaan simpanan berjangka dengan harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh BMT tersebut. Setelah itu, nasabah menandatangani kontrak kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik serta menyerahkan modal yang ingin di salurkan ke simpanan berjangka dengan batas minimum Rp 5.000.000,- sampai batas maksimum

Kedua, Implementasi setelah nasabah menyerahkan modal tersebut kewajiban BMT mengelola dana tersebut. Dalam implementasinya bahwa modal tersebut yang di dapat dari simpanan berjangka di salurkan ke pembiayaan *ar rahn* dan pembiayaan lainnya yang ada di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik

Ketiga, yaitu dalam praktik bagi hasil di BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik nisbah bagi hasil telah ditentukan di awal akad dalam bentuk nominal tidak lagi dalam bentuk prosentase, bagi hasil

- Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Andi Offset, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pres, 2016.
- Musafa'ah, Suqiyah dan Tim, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 1 (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Rahmat, Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Bangka Belitung, Jurnal, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pres, 2017.
- Sabiq, Syyid, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung, PT Alma'arif, 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung, Alfabeta, 2016.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nurul Istiqlaliyah. *Wawancara manager BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik 19 Juni 2019.*
- Pegawai BMT Surya Raharja Cabang Campurejo Gresik. *Wawancara. 20 Desember 2018.*
- Aplikasi hadis 9 Imam.
- Ummu Banana. *Wawancara, 21 Juni 2019.*
- Suryanti Febriyanti. *Wawancara, 21 Juni 2019.*
- Muhammad Rosif. *Wawancara, 21 Juni 2019.*
- Profil PINBUK. <http://pinbuk.id/>, 15 Mei 2019
- Pengertian modal. <https://kbbi.web.id/modal>, 27 juni 2019.

